Analisis Akad Mukhabarah dan Fatwa DSN-MUI No 91 Tahun 2014 terhadap Kerja Sama Tanam Cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

Azka Dara Syahrani* , Zaini Abdul Malik, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*syahraniazka@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, poponsrisusilawati@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the practice of applying the mukhabarah contract as a model of cooperation and to analyze the application of the MUI DSN Fatwa No. 91 of 2014 concerning Akad Mukhabarah in chili planting cooperation in Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency. This fatwa was issued to provide legal guidelines for business actors in implementing the mukhabarah contract, which is a form of cooperation in agriculture. This research method uses a qualitative method using a juridical-normative approach, this type of research is empirical or uses field studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were obtained through observation, interviews, documentation, and library research. Then, the data obtained is analyzed using descriptive analytical method. The results showed that the mukhabarah contract in Cihanjuang Village was still not in accordance with the pillars and conditions as well as the principles regulated in Islamic law. The tenant farmers and landowners who work together do not understand and apply the provisions in Islamic law. This cooperation provides economic benefits for both parties, although there are still some obstacles such as a lack of understanding of the details of Islamic law related to the mukhabarah contract and fluctuations in chili prices that affect the results of cooperation. In addition to the profit sharing that is not in accordance with the initial agreement, the agreement they made was only verbal and not in writing. The validity period of the contract is also not in accordance with the terms of the mukhabarah contract because there is no certainty or clarity about how long they will work together. This profit-sharing practice causes disappointment and loss to the landowner.

Keywords: *Akad Mukhabarah, Agricultural Cooperation, Profit Sharing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan akad mukhabarah sebagai model kerja sama dan untuk menganalisis penerapan Fatwa DSN MUI No. 91 Tahun 2014 tentang Akad Mukhabarah dalam kerja sama penanaman cabai di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan akad mukhabarah, yaitu suatu bentuk kerja sama dalam pertanian. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis – normatif, jenis penelitian ini adalah empiris atau menggunakan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau library research. Kemudian, data yang didapat di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mukhabarah di Desa Cihanjuang masih belum sesuai dengan rukun dan syarat juga prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Petani penggarap dan pemilik lahan yang bekerja sama kurang memahami dan menerapkan ketentuan yang ada dalam hukum Islam tersebut. Kerja sama ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap detail hukum Islam terkait akad mukhabarah dan fluktuasi harga cabai yang mempengaruhi hasil kerja sama. Selain bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, perjanjian yang mereka lakukan pun hanya secara lisan tidak secara tertulis. Masa berlaku akadnya juga tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah karena tidak ada kepastian atau kejelasan berapa lamanya mereka kerja sama. Praktik bagi hasil ini menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepada pemilik lahan.

Kata kunci: *Akad Mukhabarah, Kerja Sama Pertanian, Bagi Hasil.*

A. Pendahuluan

Sektor Pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat karena fungsinya sebagai penyedia pangan, energi, serat, dan pakan. Hal ini menyebabkan pertanian sangat vital bagi kehidupan bermasyarakat. Arus kebutuhan pangan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.[1]

Pengaruh hasil tani juga dapat meningkatkan perekonomian, dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih. Jika ada perikatan maka akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian. Maka dari itu, perikatan termasuk peraturan yang diatur secara hukum untuk menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya. Perikatan timbul dari berbagai macam jenis, salah satunya dari persetujuan kerja sama dan bagi hasil. Kerja sama dan bagi hasil itu tidak akan terlepas dari perikatan, contohnya seperti yang punya lahan akan menimbulkan perikatan dengan orang yang akan menggarap lahan tersebut, begitu juga sebaliknya orang yang akan menggarap lahan tersebut akan menimbulkan perikatan dengan orang yang mempunyai lahan.

Perikatan sama artinya dengan perjanjian, perjanjian juga timbul ketika karena adanya suatu perikatan atau hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih yang membuat perjanjian. Maka demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian sangat erat. Salah satu sumber perikatan juga perjanjian maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu yang sudah disepakati.[2]

Perjanjian menurut syariah (hukum Islam) melibatkan serangkaian prinsip dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam suatu kesepakatan. Tujuannya untuk mendapatkan hak dan kewajiban dalam kepemilikan yang sah.

Pada akhirnya semua manusia membutuhkan sesama antara satu orang dengan satu orang yang lainnya dan sudah dipastikan tidak bisa sanggup untuk memenuhi segala kebutuhannya oleh seorang diri setiap harinya. Maka dari itu hukum Islam membuat aturan untuk keperluan itu agar membatasi keinginan sampai dengan memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada manusia lainnya.[3]

Satu dari beberapa macam aktivitas individu didalam kehidupan langsung ber *mu'amalah* yaitu *mukhabarah* ataupun kerja sama. *Mukhabarah* merupakan sejenis kesepakatan antar pemilik lahan pertanian serta penggarapnya, di mana hasil panen dibagi searah kesepakatan bersama sebagaimana separuh, sepertiga, ataupun proporsi lainnya. Petani penggarap bertanggung jawab atas beban serta benih yang digunakan dalam proses pertanian.[4]

Kata Sulajman Rasyid, *mukhabarah* ialah mengurus tanah milik individu atas membagi hasil panen searah dengan kesepakatan antar mereka, serta beban untuk bibit tanaman ditanggung oleh petani yang mengolah tanah tersebut.[5] Kata ulama Syai'fiyah, *Mukhabarah* merupakan proses bercocok tanam di tanah yang hasilnya dibagikan antar pemilik serta petani, termasuk tanaman yang ditanam oleh petani.[6] Sedang Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpandangan *Mukhabarah* adalah ketika sipemilik lahan menyerahkan tanahnya pada petani untuk ditanami, namun beban benih serta pengelolaan tanah ditanggung oleh petani tersebut.[7] Hasil panen dibagi antar pemilik tanah serta petani, sementara bibit serta beban penanganannya ditanggung petani. Lazimnya kerja sama *mukhabarah* bisa dilakukan dilahan kebun dengan beban rendah serta menggunakan benih yang terjangkau, semacam cabai sebagai contohnya. Tetapi bukan cuma bibit dengan harga terjangkau yang bisa dilangsungkan kerja sama *mukhabarah*, namun bibit dengan harga yang lebih tinggi pun dilangsungkan dengan kolaborasi *mukhabarah*. [8]

Mukhabarah pandangan Fatwa DSN MUI No. 91 tahun 2014 dijelaskan perihal prinsip-prinsip dasar serta persyaratan yang diperlukan guna melangsungkan bisnis mukhabarah. Mukhabarah ialah salah satu jenis komitmen jual-beli dengan prinsip pembagian keuntungan antar dua belah individu, yang dilakukan dengan persetujuan serta kesepakatan bersama. Fatwa ini memberikan pedoman bagi umat Islam guna melangsungkan bisnis *mukhabarah* agar sepeserta atas prinsip Islam.

Komitmen *mukhabarah*, pemilik tanah serta petani membuat kesepakatan mengenai distribusi perolehan panen. Biasanya pemilik lahan menyediakan tanah saja, sementara

penggarap menyiapkan modal ataupun peralatan pertanian serta bertanggung jawab untuk mengelola serta mengerjakan lahan tersebut. Kedua individu setuju untuk membagi hasil panen searah dengan proporsi yang ditentukan dalam kontrak.

Sebagai contoh, penggarap lahan mungkin mengambil persentase tertentu dari hasil panen, serta pemilik lahan menerima sisanya. Pembagian ini dapat bervariasi berdasarkan kesepakatan antar kedua individu, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing dalam usaha pertanian.

Komitmen *mukhabarah* memiliki kesamaan dengan komitmen *muzara'ah*, tetapi ada perbedaan yang penting. Dalam komitmen *muzara'ah*, pemilik lahan menyediakan tanah serta bibit, sesertagkan dalam komitmen *mukhabarah*, pemilik tanah cuma mempersiapkan tanah, sementara petani biasanya membawa bibit ataupun modal lainnya.

Konsep ini memiliki akar dalam hukum Islam serta diatur oleh prinsip-prinsip syariah, semacam keadilan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap syarat-syarat yang telah disepakati. Komitmen *mukhabarah* mendukung kolaborasi antar pemilik tanah serta petani. Serta sering digunakan pada komunitas pertanian Islam tradisional sebagai cara untuk memastikan pembagian manfaat yang adil serta mendukung ekonomi lokal.

Kolaborasi pada skema bagi hasil ini yaitu tolong-menolong dalam bentuk kerja sama yang tidak melibatkan dosa ataupun permusuhan, semacam yang dinyatakan dalam Surat Al-Maidah ayat 2 dari al-Qur'an:

الْعُقَابَ شَدِيدًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا وَالْتَفُؤَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنًا

Artinya: “Saling bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat baik serta taqwa serta janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa serta permusuhan” (Q.S Al-Maidah ayat 2).[9]

Kerjasama bisa terjadi pada bisnis perkebunan serta peternakan, bisa juga pada bisnis jual-beli serta industri. Masalah pada penelitian ini tersebut terkait dengan pembagian hasil kerja samanya, demikian perlu diadakan analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai sistem pembagian hasilnya apakah telah sinkron dengan prinsip islam ataupun tidak.

Observasi awal dalam sistem kerja sama bercocok tanam tanaman cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Bisa dijelaskan yaitu, mereka berkerja sama dengan pemilik lahan untuk bertanam tanaman cabai, sistem pembayaran kerja sama tersebut disepakati dengan cara penggarap lahan tersebut akan membayar oleh beberapa cabai yang telah panen. Bagi hasil yang sudah disetujui oleh dua individu, yakni penggarap tanah memperoleh 2/3 buah hasil ataupun sama dengan 66%, sesertagkan pemilik tanah memperoleh 1/3 buah hasil ataupun 34%. Pembagian hasil ini disepakati oleh kedua belah individu secara ucapan ataupun hanya kesepakatan melalui komunikasi langsung, tidak dituangkan secara tertulis. Modal untuk bibit cabai, menggarap tanaman, serta lain-lain itu dari yang akan menggarap tanah pertanian itu. Serta yang memiliki lahan tersebut hanya menyediakan lahan. Namun dalam bagi hasil tersebut tidak searah dengan kesepakatan yang disetujui di awal serta pada kesepakatan tersebut salahnya tidak ada bukti kesepakatan tertulis.[10] Maka ada permasalahan dalam sistem kerja sama bagi hasilnya. Sehingga demikian penulis tergiring untuk mendalami mengenai “Analisis Fatwa DSN MUI No. 91 Tahun 2014 Tentang Akad Mukhabarah Terhadap Kerja Sama Tanam Cabai Di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian masalah yang akan di teliti yaitu, Analisi praktik kerja sama bagi hasil dalam bertanam cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat; Analisis Hukum Islam Akad Mukhabarah terhadap sistem bagi hasil tanam cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat; dan Analisis Fatwa DSN MUI No. 91 tahun 2014 perihal komitmen *mukhabarah* dengan menggunakan sistem bagi hasil tanam cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mana metode ini merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif

terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atas sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.[11]

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dilaksanakan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, dalam penelitian ini yang dikaji adalah mengenai ketentuan bagi hasil rukun dan syarat akad mukhabarah dalam sudut pandang fikih *mua'malah* pada fatwa dsn mui no. 91 tahun 2014, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.[12]

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis empiris atau studi lapangan (*field research*). Pada penelitian ini merujuk ke pengumpulan data berdasarkan observasi secara langsung dan mendapatkan fakta yang konkret. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih realistis, kontekstual, dan rinci dibandingkan dengan metode penelitian lain yang lebih terkontrol seperti eksperimen laboratorium atau survei online.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh peneliti langsung dari pengamatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, baik dari buku, jurnal, laporan dan lain- lain yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode Wawancara, merupakan metode guna memperoleh informasi mengenai kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam akad *mukhabarah* dengan bertanya secara langsung kepada pihak pemilik tanah/lahan dan kepada petani penggarap tanah/lahan. Dengan indikator variabel rukun dan syarat dalam akad *mukhabarah* menurut syariat Islam. Dokumentasi, metode guna menjadi bukti dari penelitian tersebut. Studi Pustaka, sering disebut juga tinjauan literatur (*literature review*) suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber informasi yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.[13]

Metode Analisis Data, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa. Metode deskriptif analisis ini digunakan untuk memperoleh data-data deskriptif berupa kalimat secara tertulis ataupun lisan dari berbagai studi kepustakaan, selanjutnya dikuatkan lagi dengan sumber data primer dan sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau fenomena tertentu telah disampaikan dalam skripsi ini. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, diantaranya ialah:

Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Lahan Untuk Bertanam Cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

Praktik kerja sama bagi hasil di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat mengacu kepada rukun dan syarat kerja sama dalam akad *mukhabarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil panen rata-rata per tahunnya yaitu 48 karung atau setara dengan 480 kg. Besaran persen yang berhasil panen itu rata-rata 60% tiap tahunnya, 40% sisanya ada kegagalan panen karena bisa terjadi entah dari adanya hama, busuknya cabai, atau virus kuning.

Bagi hasil dalam kerja sama sebagaimana disepakati pada awal perjanjian dengan secara lisan tidak tertulis yaitu, dibagi setiap bulannya kalau petani penggarap mendapatkan 65% dari

hasil panen dan pemilik lahan mendapatkan 35% dari hasil panen. Petani penggarap disini yang menyediakan semua modalnya seperti alat-alat untuk bertani, bibit tanaman cabai, pupuk, dan lain-lain. Pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja.

Alasan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja karena pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dalam bertani dan juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus hal seperti ini. Sedangkan petani penggarap tersebut memang mempunyai keahlian dalam bertanam cabai, petani penggarap tersebut sudah mempunyai pengalaman dalam bertanam cabai dari tahun 2013. Umur dari kedua belah pihak tersebut juga sudah termasuk umur *mumayyiz*.

Selain itu kerja sama ini sudah berjalan 5 tahun dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini. Pihak yang terlibat dalam kerja sama bagi hasil tanam cabai tersebut hanya ada 3 orang yaitu, 2 orang dari pihak petani penggarap dan 1 orang lagi dari pihak pemilik lahan. Lahan yang dipakai untuk bertanam itu luasnya 4,2 are atau sama dengan 420 m². Kondisi lahan di daerah Desa Cihanjuang juga tanahnya subur dan lembab, cocok untuk ditanam tanaman cabai. Walaupun kondisi tanah sudah bagus, pupuk kompos tetap di pakaikan. Pupuk kompos yang berasal dari sampah kulit buah, sayur, dan daun-daunan. Lahan tersebut juga sebelumnya sudah ditanam beberapa tanaman selain tanaman cabai, seperti sayur-mayur waluh, jagung, dan masih banyak lagi.

Praktik ketidaksesuaian yang dilakukan oleh kerja sama bagi hasil tanam cabai di lahan ini yaitu adanya ketidak sesuaian bagi hasil dengan perjanjian di awal dan tidak ditentukannya (tidak jelas) masa berlakunya akad ini. Pihak petani penggarap tidak adil karena bertindak samaunya dalam bagi hasil ini tanpa adanya bukti yang jelas kenapa bagi hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Alasan pihak petani penggarap itu karena ada beberapa cabai yang agak kurang segar atau membusuk dan waktu dijual pun harga cabainya jadi menurun (lebih murah) dari harga pasaran, tetapi tidak ada bukti seperti foto atau laporan kalau cabainya itu kurang segar (membusuk). Tindakan pemilik lahan pun hanya bisa menekankan kepada petani penggarap supaya lebih jujur dan adil dalam pembagian hasilnya.

Pemilik lahan hanya bertindak seperti itu karena di awal perjanjian, perjanjiannya hanya secara lisan atau dari mulut ke mulut saja tidak secara tertulis. Alasan pemilik lahan dan petani penggarap tersebut hanya melakukan perjanjian lisan, karena pemilik lahan tersebut sudah kenal dengan petani penggarap dari teman dekatnya jadi di antara kedua belah pihak sudah saling percaya. Masa berlaku kerja sama tersebut juga tidak ditentukan karena memang tidak direncanakan sampai kapannya. Hanya sekedar rencana sampai lahan tersebut digunakan untuk keperluan lain dari pemilik lahan, contohnya akan dibangun menjadi sebuah rumah atau yang lainnya dan itupun memang tidak tahu kapan akan dibangunnya.

Analisis Hukum Islam Terkait Praktik Kerja Sama Tanam Cabai dengan Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Islam memberikan kebebasan tetapi ada beberapa syarat untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan cara yang sesuai sama perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, selama hal itu tidak merugikan sesama atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas itu sebuah peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan harta mereka dengan cara yang batil, contoh seperti membuat sumpah palsu, mengingkari janji, atau cara-cara batil lainnya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kita tidak boleh merugikan sesama manusia dengan mengambil hak-hak mereka. Hak-hak dalam pembagian hasil berarti tidak membagi hasil kepada pemilik lahan lebih rendah dari bagi hasil yang seharusnya mereka dapatkan dari perjanjian awal.

Bagi hasil telah ditetapkan dalam perjanjian awal, praktik bagi hasil yang dilakukan disini beberapa halnya tidak mengikuti rukun dan syarat pada akad *mukhabarah*. Bagian rukun akad *mukhabarah* praktik kerja sama bagi hasil tanaman cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, tetapi dalam ijab dan qabul nya hanya secara lisan saja tidak tertulis. Sedangkan bagian syarat akad *mukhabarah* praktik kerja sama bagi hasil tanaman cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini ada ketidaksesuaian dengan ketentuannya yaitu, persenan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan persenan yang telah ditetapkan di awal dan masa berlakunya juga tidak ada kejelasan dan kepastian dari awal perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan juga hanya dilakukan secara lisan tidak tertulis. Hal ini tidak memenuhi adanya rukun dan syarat dalam berakad *mukhabarah* / ber *mu'amalah*, yang mana seharusnya seorang petani penggarap tidak boleh tidak adil dan tidak jujur terhadap pemilik lahan dengan membagi hasil tidak sesuai persenan.

Analisis Fatwa DSN MUI No. 91 Tahun 2014 Terkait Praktik Kerja Sama Tanam Cabai dengan Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Fatwa DSN MUI No. 91 tahun 2014 hasil pertanian itu harus dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai nisbah yang ditentukan di awal. Menurut teori Sulajman Rasyid juga *mukhabarah* itu mengelola lahan orang lain dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan antara keduanya di awal perjanjian.

Mukhabarah menurut Fatwa DSN-MUI yaitu ada dalam Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan pembiayaan sindikasi yaitu akad antara beberapa Lembaga Keuangan Syariah, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai usaha tertentu secara bersama-sama.

Berdasarkan fatwa tersebut juga dalam poin nomor 10 dijelaskan terkait akad *mukhabarah*. Akad *Mukhabarah* yaitu akad kerja sama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (petani penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai nisbah yang disepakati.[14]

Kerja sama bagi hasil ini juga diharuskan adanya prinsip keadilan yang diterapkan dalam akad *mukhabarah*, karena perlu juga pengawasan guna terselenggaranya transaksi *mukhabarah* yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua belah pihak.[1] Kerja sama ini perlu mempertimbangkan praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan. Pentingnya bagi hasil antara dua belah pihak dengan kejujuran dan keadilan, pentingnya juga masa berlaku kerja sama ini. Jujur dan adil bermakna jelas dan transparansi juga mengenai kerja sama bagi hasil ini dengan masa berlaku yang jelas.

Analisis praktik kerja sama bagi hasil tanam tanaman cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hukum Islam sangat penting untuk mengatur segala bentuk atau rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam seperti harus sesuai terhadap pembagian hasil ini kepada pemilik lahan dan harus pasti ditentukan masa berlaku akadnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama bagi hasil tanah / lahan untuk bertanam cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menunjukkan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam bagi hasilnya. Masa berlaku akadnya juga tidak sesuai karena tidak ada kepastian atau kejelasan berapa lamanya mereka kerja sama. Petani penggarap tersebut memberi persenan bagi hasilnya kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Permasalahannya pun ada di perjanjian mereka karena perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan tidak secara tertulis. Praktik bagi hasil ini menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepada pemilik lahan.

2. Analisis hukum Islam terkait praktik kerja sama tanam cabai dengan menggunakan sistem bagi hasil di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat berdasarkan akad *mukhabarah* menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syarat akad *mukhabarah*. Dalam konteks hukum Islam praktik kerja sama bagi hasil tersebut termasuk kedalam praktik jual beli akad *mukhabarah* dan terdapat unsur ketidaksesuaian dalam bagi hasilnya, dengan begitu kerja sama bagi hasil ini masih belum sesuai dengan syariat Islam. Masa berlakunya pun tidak ditentukan atau dijelaskan sampai kapannya, maka dalam akad *mukhabarah* kerja sama bagi hasil tanam cabai yang peneliti teliti ini tidak sah / tidak sesuai dengan syarat akad *mukhabarah*.
3. Analisis Fatwa DSN MUI No. 91 tahun 2014 terkait praktik kerja sama bagi hasil tanam cabai dengan menggunakan sistem bagi hasil di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 91 tahun 2014 hasil pertanian itu harus dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai nisbah yang ditentukan di awal, sedangkan dalam hasilnya tidak sesuai pembagian hasilnya.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal – hal baik. Pihak – pihak lain yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan lainnya dalam membantu skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, vol. 01. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- [2] A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- [3] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 11. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- [4] P. Srisusilawati and N. Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Law Justice*, vol. 2, no. 1, pp. 12–23, 2017, doi: 10.23917/laj.v2i1.4333.
- [5] A. R. Ghazaly, G. Ihsan, and S. Shidiq, “Fiqh Muamalat.” Prenadamedia Group, Jakarta, p. 336 hlm, 2010.
- [6] S. Al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insan Perss, 2005.
- [7] Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah,” *Tawazun J. Sharia Econ. Law*, vol. 3 No. 1, 2020.
- [8] H. Suhendi, *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- [9] M. R. Maududi Islam, P. A. Agus Putra, and I. Nurrachmi, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 63–67, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.392.